

MEMBANGUN KEMITRAAN UNIVERSITAS DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SYARIAH DI JAWA BARAT

Dadang Husen Sobana & Mia Lasmi Wardiyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung
Email : Mialasmiwardiyah@gmail.com

ABSTRAK

Ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM di antaranya adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Ini terjadi karena UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi, kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Tujuan penelitian untuk membangun suatu model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, model kemitraan yang ingin di bangun antara UIN SGD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah model *an-Nashirul Kaffah*, dengan *aqad mudharabah* atau *musyarakah*.

KATA KUNCI

Kemitraan, Industri Kreatif, Berbasis Syariah

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah daratan 3.711.654.00 hektar dan garis pantai sepanjang 724,85 km, dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota, yang terbagi ke dalam 626 kecamatan, 5.285 desa, serta 638 kelurahan, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten terbaru, yaitu Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.¹

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk pada tahun 2011 mencapai 44.286.519 jiwa. Penyerap terbesar tenaga kerja pada Agustus 2011 adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, yang mampu menyerap 4.554.503 orang (26,09 persen).

Berikutnya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 3.675.713 orang (21,06 persen), industri dengan tenaga kerja 3.571.915 orang (20,46 persen), jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan, dengan tenaga kerja 2.699.014 orang (15,46 persen), serta sektor lainnya 2.953.636 orang (16,92 persen). Berdasarkan status pekerjaan, pada bulan Agustus 2011 tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal mencakup 56,55 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Pada sektor inilah kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif ini berada.²

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu, seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit, serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Disamping itu, UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional.

¹ Ahmad Heryawan, *Menata Sistem Pemerintahan dan Aparatur yang amanah untuk pembangunan Jawa Barat*, Gunung Jati Press, 2014, hal 168.

² Ibid hal 170

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.³

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi

dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar.⁴ Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi

³ Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. *Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002

⁴ Ishak, Effendi. 2005. *Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*. Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat.

pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran pembiayaan perbankan, penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Jawa Barat, di tengah mayoritas penduduk yang beragama Islam, serta dengan para pelaku usaha yang tentu mayoritas muslim juga, industri kreatif (khususnya berbasis syari'ah) perlu dikembangkan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, karena memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah (Departemen Perdagangan, 2008), terutama dalam rangka menjemput industri pariwisata syari'ah dunia (global. Di tengah era yang kompetitif dan perdagangan bebas (MEA sudah diberlakukan) ini, maka peran perguruan tinggi dalam memberikan pengaruh positif terhadap industri kreatif menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi di Jawa Barat, perguruan tinggi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan. Dari empat pilar, dengan Jawa Barat, MASAGI (Akademisi perguruan Tinggi, Pengusaha, Pemerintah dan Komunitas). Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu model yang memadai untuk menerjemahkan Jabar MASAGI tersebut.

Tujuan Penelitian, untuk membangun model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif

berbasis Syari'ah di Jawa Barat. Dan, untuk memetakan peluang aplikasi dari model tersebut dalam pelaksanaan kemitraan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah yang dibahas. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik dan jelas serta komprehensif, dalam hal ini untuk mendikripsikan model kemitraan yang akan dibangun antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Usaha ekonomi kreatif berbasis syari'ah. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan observasi ke bagian perekonomian pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pusat Bisnis UIN SGD dan Pusat Kerjasama UIN SGD serta dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam serta *Focus Group Discussion* (FGD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah model alternatif yang mencirikan khas UIN Sunan Gunung Djati yang dapat dikembangkan

dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis syari'ah di Jawa Barat adalah dengan model *an-nashirul kaffah*.

Pengertian model *an-Nashirul Kaffah*

Kata ini diambil dari suku kata bahasa arab, yaitu *an-Nashirul* dan *al-kaffah*. *An-Nashirul* berasal dari kata *nashoro*, yang memiliki arti menolong (tanpa pamrih). Dan kata *kaffah* memiliki arti keseluruhan atau sempurna. *An-Nashirul* (menolong tanpa pamrih) dalam penelitian ini memiliki pengertian bahwa proses pendampingan atau pemberdayaan yang dilakukan perguruan tinggi terhadap mereka para pelaku UMKM di industri ekonomi kreatif berbasis syari'ah ini tanpa menerima pembayaran sebagaimana mestinya. Ini dapat diperankan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan terlebih dahulu didahului oleh adanya MOU (*memorandum of understanding*) antara rektor dengan gubernur Jawa Barat selaku pihak pemilik kebijakan dan pendanaan. sehingga proses pendampingan atau pembinaan oleh dosen-dosen menjadi bagian pengabdian dan bernilai sebagai bagian dari tugas pokok sebagai seorang dosen. Dan mahasiswa menjadi bagian dari praktikum mata kuliah atau PPL dari jurusan yang memiliki hubungan langsung dengan mata kuliah.

Proses pendampingan ini bisa dilakukan oleh sekurang-kurangnya 5 jurusan yang sudah ada yaitu Jurusan Manajemen Fakultas FISIP, Jurusan MKS,

Muamalah, Ekonomi Syariah dan Akuntansi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Sedangkan *Kaffah* (keseluruhan) memiliki makna keseluruhan kebutuhan dan kelemahan UMKM selama ini (manajemen, pemasaran, permodalan, teknologi tepat guna) hingga bagaimana bijak membayar pajak dan zakat semuanya di-dampingi.

Model ini memiliki kekhususan dengan model lainnya, dimana pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan bantuan permodalannya mesti dengan skema akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Mereka perlu didampingi agar tidak lepas arah dalam menggunakan pembiayaan yang diterima.

Jadi, yang dimaksud model *an-Nashirul Kaffah* adalah sebuah model kemitraan (*partnership*) yang dilakukan oleh UIN Sunan Gunung Djati dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada pelaku UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah terhadap semua kebutuhan dan kelemahan terutama dalam hal pendanaan dengan menggunakan skema pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dengan pendampingan secara langsung dari UIN Sunan Gunung Djati.

Model *an-Nashirul Kaffah* ini merupakan satu upaya guna mendorong para pelaku usaha ekonomi kreatif yang berbasis syari'ah agar dapat mandiri dan berdaya saing serta bisa diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

sekaligus mengatasi kemiskinan sekaligus dengan tetap mencirikan keislaman yang *kaffah*.

Juga bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap perkembangan dan kemandirian para pelaku usaha industry kreatif berbasis syari'ah salah satu upayanya dalah dengan memanfaatkan peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi secara nyata dan berkesinambungan.

Secara Makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan berbasis syari'ah yang makin berkembang dan berdaya saing, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Mekanisme model *an-nashirul kaffah*

Metode *An-Nashirul Kaffah* berjalan dan berproses sebagai berikut: *Tahapan pertama*, terlaksananya Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN Sunan Gunung Djati dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan pendampingan UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah; pada tahap ini pemerintah dapat berperan sebagaimana mestinya, di antaranya: sebagai motivator, fasilitator, regulator, koordinator, sekaligus kontrol.

Tahapan Kedua, Pemerintah Provinsi melalui Bank Jabar Syari'ah (Bjbs) memberikan pembiayaan kepada UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah dengan skim pembiayaan usaha produktif dan atau modal kerja dengan pola atau *akad mudharabah* atau *musyarakah*.

Tahapan Ketiga, Pemprov memberikan *list* (daftar nama) UMKM mana yang sudah dapat pembiayaan dan perlu pendampingan kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Pusat Kerjasama dan atau Pusat Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

Tahap Keempat, Pusat Bisnis meneruskan kepada lima (5) jurusan sesuai kompetensinya, yaitu Jurusan Manajemen Keuangan, Muamalah, Ekonomi Syari'ah dan AKuntansi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Jurusan Manajemen Fakultas Sosial Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

Tahap kelima, dosen dan mahasiswa di lima jurusan tersebut melakukan proses pendampingan dengan berbagai tahapan diantaranya: 1) memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Dik-Lat) terkait kebutuhan dan kelemahan UMKM selama ini; 2) Pendampingan lapangan (di tempat pelaku UMKM) oleh dosen dan mahasiswa. Selama proses ini dosen dan mahasiswa melakukan identifikasi sekaligus memberikan solusi terkait kebutuhan dan kelemahan yang ada; 3) Setelah dilakukan diklat dan proses pendampingan secara kontinyu, ditambah dengan kepercayaan diri dari para pelaku UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah ini, kemudian tahap selanjutnya adalah 4) mengikut sertakan para pelaku UMKM ini pada pameran-pameran yang diadakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta atau perusahaan-perusahaan atau Perguruan Tinggi baik UIN Sunan Gu-

nung Djati maupun perguruan tinggi lainnya.

Tahap keenam, adalah tahapan terakhir, yaitu dibukanya Galeri UMKM di UIN Sunan Gunung Djati. Pada tahap ini masuk juga tahap *advertising*. Dimana tahap ini produk-produk yang merupakan bukti dan hasil dari adanya proses pendampingan yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa disimpan disuatu tempat yang membuat para mahasiswa dan dosen serta tamu-tamu yang datang ke UIN Sunan Gunung Djati baik dari dalam maupun luar negeri, perguruan tinggi negeri maupun swasta mengetahui akan adanya UMKM dengan segala produk dan turunannya.

Tujuan akhir dari adanya model pendampingan dengan pola kemitraan antara UIN Sunan Gunung djati tentu bermuara pada tujuan yang sama, yaitu peningkatan kinerja dan performance UMKM yang bergerak di industry ekonomi kreatif berbasis syari'ah itu sendiri.

Keunggulan Model *an-Nashirul Kaffah*

Dalam analisa peneliti, model *an-Nashirul Kaffah* ini memiliki keunggulan bila dipakai untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah, karena :

1. Model ini dirancang untuk melakukan proses pendampingan yang sebelumnya diawali oleh kemitraan antara Universitas dengan Pemerintah Provinsi terlebih dahulu, dari hulu hingga hilir, dari A sampai Z.

2. Model ini menjadi bukti sinergitas antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
3. Berbiaya murah, karena unsur yang melakukan pendampingan (dosen dan mahasiswa) tidak diberi upah melainkan menjadi bagian integral dari tugas sebagai dosen dan mahasiswa melalui pintu pengabdian masyarakat dan praktikum mata kuliah.
4. Penyaluran kredit (pembiayaan) dari Pemerintah daerah disalurkan melalui Bank miliknya, dalam hal ini BJBS dengan skim pembiayaan musyarakah/mudharabah, aqad ini sangat cocok untuk pelaku UMKM yang ingin berkembang.
5. Melakukan pendampingan pula dalam berbagai sisi ekonomi keislaman seperti *spiritual marketing, spriritual communication, spiritual production, spriritual consumption*, dan lain-lain.

Peluang pelaksanaan model kemitraan

Peluang untuk dilaksanakannya model *an-Nashirul Kaffah* ini cukup besar serta logis juga strategis untuk diaplikasikan, karena:

1. Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini telah memiliki BUMD Keuangan yang cukup sehat dan besar serta sesuai standar keuangan syari'ah, yaitu Bank Jabar Syari'ah (Bjbs)
2. Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki sumber daya manusia yang unggul

dan kompetitif (Dosen dan Mahasiswa) seiring dengan telah dibukanya beberapa jurusan yang dari sisi objek penelitian cukup memiliki hubungan, yaitu: Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah dan Manajemen, Akuntansi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah. Pada tahap ini, UIN SGD Bandung berperan sebagai *Channeling Agent* untuk bidang usaha UMKM yang memerlukan teknologi atau *managerial skill* dan *know how*.

3. Cukup banyak UMKM ekonomi kreatif yang berbasis syariah di Jawa Barat yang memerlukan pendampingan dan pembinaan.

SIMPULAN

Model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat yang perlu dibangun adalah model kemitraan atau kerjasama *an-Nashirul Kaffah*. Dimana, dalam model kemitraan tersebut, pemberian pembiayaan oleh Pemprov kepada UMKM dilakukan dengan *aqad mudharabah* atau *musyarakah*. Dan selama pembiayaan itu berlangsung, proses pembinaan

dan pendampingannya diserahkan kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sebelumnya sudah dilakukan *memorandum of understanding* (MoU) dengan Pemerintah Provinsi.

Peluang untuk dilaksanakannya model *an-Nashirul Kaffah* ini cukup besar serta logis juga strategis untuk diaplikasikan, karena: a) Pemerintah Jawa Barat telah memiliki BUMD Keuangan yang cukup sehat dan besar serta sesuai standar keuangan syari'ah, yaitu Bank Jabar Syari'ah (BJBS); b) Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif (Dosen dan Mahasiswa) seiring dengan telah dibukanya beberapa jurusan yang dari sisi objek penelitian cukup memiliki hubungan, yaitu: Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah dan Manajemen, Akuntansi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah. Pada tahap ini, UIN SGD Bandung berperan sebagai *Channeling Agent* untuk bidang usaha UMKM yang memerlukan teknologi atau *managerial skill* dan *know how*. c). Cukup banyak UMKM ekonomi kreatif yang berbasis syariah di Jawa Barat yang memerlukan pendampingan dan pembinaan.*

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Lukas Setia. 2009. *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Bank Indonesia, Sistem Informasi Pola Pembiayaan: Lending Model Usaha Kecil, Jakarta, 2005.
- Basu, Subhajit (2004). E-government and developing countries: an overview. *International Review of Law, Computers & Technology*, Volume 18, Number 1/March 2004, Routledge, part of the Taylor & Francis Group.[2]
- Chapra, M Umer (2000): *Ekonomi Moneter*, Jakarta, Gema Insani
- Coglianesi, Cary (2004). *Information Technology and Regulatory Policy: New Direction for Digital Government Research*, Massachusetts: Harvard University (Regulatory Policy Program).
- Chang & Rowthord dalam Nining I. Soesilo, "Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Jakarta, FE-UI, 2000.
- Dajan, Anto., *Pengantar Metode Statistik*. Jilid 1, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Fang, Z. (2002). E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *The International Journal of the Computer*.
- Gronlund, Ake, Annika Anderson, and Karin Hedstrom (2005). *Next Step eGovernment in developing countries: Report D2 Needs and opportunities for Swedish support in Government and IT-supported education in selected countries in Africa and Asia*, Örebro University (Informatics).[9]
- Hasan, Iqbal. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, Iqbal. 2013. *Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, M Ali (2003): *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ho, ATK (2002). *Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative*. *The Public Administration Review*.
- Karim, Adiwarman (2004): *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Kumar, A. (2003). E-Government and Efficiency, Accountability, and Transparency. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Country*. [5]
- Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Pengembangan Kerjasama Kemitraan UKMK, Koperasi dan Masyarakat, Jakarta, 2002.
- Kraemer, Kenneth L. and John L. King (2003). *Information Technology and Administrative Reform: Will the Time after E-Government be Different?* Center for Research and Information Technology and Organisations, University of Irvine, California and University of Michigan, Ann Arbor, USA. [6]
- Kreukels, A. M. J., E. J. Prins, et al. (1987). *Public-Private Partnership*. Rotterdam, Forumvoor Stedelijke Vernieuwing. [7]
- Krueger, C., K van der Beek, and PMC Swatman (2004). *New and Emerging Business Models for Online News: A Survey of 10 European Countries*. Proceedings of the 17th Bled eCommerce Conference. [8]
- Lembaga Administrasi Negara, *Kajian Implementasi Aliansi Strategik Pada KAPET*, Jakarta, 2003.
- Mudrajad Kuncoro & Irwan Adimaschandra S., *Analisis Formasi Keterkaitan, Pola Kluster dan Orientasi Pasar*, *Jurnal Empirika* Volume 16 No. 1 Juni 2003.
- Marche, S. and J. McNiven (2003). *E-government and E-governance: the future isn't what it used to be*, Administrative Sciences Association of Canada.
- Natawiria, Asep Suryana dan Riduwan. *Statistika Bisnis*. 2010. Bandung: ALFABETA.
- Osborne & Gaebler dalam Abdul Rosyid, "Mewirauahakan Birokrasi: mentransformasi semangat wirausaha dalam sector public", Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Osborne & Peter Plastrik dalam Mustopadidjaja, AR, "Paradigma-Paradigma Pembangunan: Dan saling hubungannya dengan model, strategi, dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan", Jakarta, 2003.
- Papantoniou, A., E. Hattab, F. Afrati, E. Kayafas, and V. Loumos (2001). *Change Management, a Critical Success Factor of E-Government*. The 12th International workshop on Database and Expert Systems Applications.
- Porter, M.E., *Cluster and the New Economic of Competition*, Harvard Business Review, November-December (6) 77-91, 1998.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga. Chang & Rowthord dalam

- Nining I. Soesilo, "Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Jakarta, FE-UI, 2000.
- Riedl, Reinhard (2005). A Generic Architecture for G2G and One Stop G2C E-Government, based on Web Service Composition.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2000. *Metoda Statistika*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Somantri, Ating dan Ali Muhidin. 2011. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabiq (1987): Fikih Sunnah 12, Bandung, Alma'arif
- Siddiqi, M Nejatullah (1996): Kemitraan dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sula, Muhammad Syakir (2004): Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta, Gema Insani
- Sudjana. *MetodeS tatistika*, 2005. Bandung: Tarsito.
- Supranto, J. 1987. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The Kian Wie, Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Kecil, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah.